



Rekonstruksi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah: Bukan Sekedar Bantuan Sosial

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Jawa Tengah adalah salah satu pusat pertumbuhan nasional, namun angka kemiskinan masih di atas nasional. Beberapa kendala penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah antara lain: kebijakan belum memuat desain utuh, *government-oriented*, bersifat parsial, serta masih ada ketimpangan pendapatan dan pembangunan. Anggaran pengentasan kemiskinan masih terkonsentrasi untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, sementara itu alokasi untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin masih terbatas. Masalah lain adalah akurasi dan validasi data kemiskinan yang berdampak pada salah sasaran. Beberapa langkah strategis yang bisa diambil dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan antara lain: *pertama*, penyusunan *blueprint* atau *grand desain* yang terintegrasi dengan pendekatan holistik-komprehensif. Desain, strategi dan rencana aksi terintegrasi antar sektor, antar level makro-mikro dan kewilayahan, sinkron dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta multiaktor non-pemerintah. *Kedua*, program dan kegiatan mencakup aspek ekonomi makro (pemerataan pendapatan dan pengupahan), berbasiskan wilayah, layanan dan kebutuhan dasar, serta kolaborasi antar *stakeholders*. *Ketiga*, pemetaan akurat melalui kombinasi pendekatan makro, pendataan mikro (*by name by address*) dan multidimensi. *Keempat*, menyesuaikan alokasi anggaran peningkatan pendapatan masyarakat miskin dengan fokus pada penciptaan kesempatan kerja dengan upah yang kompetitif dan menumbuhkan wirausaha baru. *Kelima*, perangkat daerah merumuskan kegiatan berdasarkan desain dan strategi yang telah ditetapkan.

Pendahuluan

Angka kemiskinan Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir selalu di atas nasional, dan tertinggi di Jawa-Bali setelah DIY. Pada 2023 (Maret) angka kemiskinan Jawa Tengah 10,77% sementara nasional 9,36%. Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah 3,79 juta jiwa atau berkontribusi 14,63% terhadap nasional (25,90 juta jiwa). Jumlah tersebut merupakan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Barat.

Target angka kemiskinan dalam RKPD 2024 diproyeksikan 9,76-8,96%. Berdasarkan data BPS, penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah tertinggi pada tahun 2017-2018 sebesar 1,69% poin, dan rata-rata antara tahun 2011 – 2019 sebesar 0,62% poin. Pasca pandemi Covid-19, penurunan tahun 2021-2022 sebesar 0,86% poin dan tahun 2022-2023 hanya 0,16% poin, sementara penurunan di tingkat nasional 0,18% poin. Perbedaan angka kemiskinan nasional dan Jawa Tengah di tahun 2022 sebesar 1,39% poin menjadi 1,41% poin di tahun 2023. Berdasarkan fakta tersebut, diperlukan kerja ekstra untuk menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah.

Berdasarkan data BPS Jawa Tengah (2023), masyarakat miskin berusia rata-rata 50,01 tahun. Sebagian besar bekerja di sektor pertanian 31,25%, industri 11,26%, tidak bekerja 10,19%, dan lainnya 47,30%. Sebanyak

33,38% kepala rumah tangga miskin lulusan SD, 18,06% tidak sekolah, 16,67% lulus SMP, dan 24,10% lulusan SLTA. Kepala Keluarga perempuan di rumah tangga miskin sebanyak 12,90%.



Gambar 1
Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2023
Sumber: BPS Jawa Tengah 2023 (diolah)

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.1.139.823.784.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan.

Tabel 1
Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah
Tahun 2023

Strategi	Alokasi (Rp)	%
Mengurangi beban pengeluaran	612.867.349.000	55,05
Meningkatkan pendapatan	77.654.829.276	6,98
Meminimalkan kantong kemiskinan	422.739.986.000	37,97
Grand total	1.113.262.164.276	100

Sumber: TKPKD Provinsi Jawa Tengah (2023)

Berdasarkan data pada Tabel 1, sebagian besar anggaran penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran (bansos, hibah dan perlindungan sosial). Hal ini sesuai dengan analisis Suryahadi (2023), karena lebih mudah outputnya, lebih mudah selesai dalam pelaksanaannya dan lebih bisa dilihat hasilnya dibanding peningkatan pendapatan.

Deskripsi Masalah

Dalam Peraturan Gubernur Jateng Nomor 60 tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan 2019-2023 terdapat 4 (empat) strategi, yaitu: penyediaan *basic life access*; penguatan *sustainable livelihood*; peningkatan ketersediaan dan kecukupan pangan; serta penguatan tata kelola dan koordinasi. Empat strategi tersebut dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) yang diprioritaskan pada dimensi pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan); peningkatan pendapatan (ketenagakerjaan); serta prasarana dasar dan ketahanan pangan.

Namun, dokumen tersebut belum memuat beberapa isu strategis antara lain kemiskinan berdasarkan wilayah (misalnya, pegunungan dan pesisir) dan kesenjangan ekonomi. Kameo (2023) memberikan catatan terhadap dokumen RAD tersebut sebagai berikut: 1) dokumen belum menunjukkan posisinya sebagai suatu *Grand Design* penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah; 2) komprehensif tetapi parsial, bukan suatu rancangan utuh yang saling terkait antar komponen dan masih kuat ego sektoral; 3) *government-centered responsibility*, seolah-olah semua tugas harus dilakukan pemerintah.

Rencana aksi di dalam regulasi tersebut hanya memuat dimensi layanan dan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, sarpras dasar, dan pangan), belum mencakup pendekatan makro seperti investasi, pengupahan, atau pendapatan per kapita. Rumusan rencana aksi juga belum memiliki keterkaitan dengan program pusat dan kabupaten/kota. Agenda yang dituangkan dalam kebijakan tersebut merupakan program perangkat daerah yang sudah ada, bukan sebuah desain yang disusun secara khusus dan diturunkan menjadi program. Menurut Suryahadi (2023), program di tiap perangkat daerah dibatasi oleh tugas pokok dan fungsi, program masih parsial, sinkronisasi dan overlay antar perangkat daerah belum tersistem dengan baik, belum ada tracking konvergensi program antar OPD.

Selain pada tataran dokumen kebijakan, dalam implementasi terdapat ketidaktepatan bentuk program maupun sasaran penerima (Bappeda Jateng, 2019). Hal itu terjadi karena basis data kemiskinan belum valid, sehingga penduduk yang berhak mendapatkan program bantuan sosial tidak terdata, sebaliknya orang yang tidak miskin terdata dan mendapat bantuan (Bappeda Jateng, 2019). Temuan tersebut diperkuat laporan Badan Pemeriksa Keuangan, dimana ditemukan 21 juta data ganda penerima

bantuan sosial (bansos), 3.877.965 data NIK tidak valid, 41.985 duplikasi data keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nama dan NIK yang sama (Dwiarto, 2023).

Penelitian Zuhri dan Sofianto (2020) mengungkapkan bahwa implementasi program lebih bersifat pemberian yang lebih mengarah kepada kegiatan konsumtif dibanding produktif karena kurangnya edukasi kepada masyarakat untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Hermawati dan Winarno (2020) juga menemukan bahwa pemahaman penerima program hanya sebatas pada bantuan yang diterima, bukan tentang hakikat program untuk membantu mengentaskan mereka dari kemiskinan. Penelitian Amalia dan Samputra (2020) di Jakarta menemukan bahwa ketergantungan terhadap bantuan pemerintah berdampak pada melemahnya ketahanan ekonomi keluarga miskin.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Penanganan kemiskinan yang tepat perlu disesuaikan dengan akar masalahnya. Untuk itu, diperlukan analisis yang bersifat makro, mikro, kewilayahan dan multidimensi. Hermawati (2017) menyatakan bahwa intervensi penanggulangan kemiskinan seharusnya mempertimbangkan kemiskinan yang multidimensi serta aspek lokalitas karena membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik. Selanjutnya, Saryana (2020) menemukan bahwa pola kebijakan yang tidak homogen lebih tepat diterapkan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan penyebab kemiskinan masing-masing daerah yang beragam. Salah satu alat analisis kemiskinan yang dapat digunakan untuk membantu memotret kebutuhan riil adalah pendekatan multidimensi. Budiantoro, et.al, (2013), menyatakan bahwa pendekatan multidimensi mampu menjelaskan kondisi kemiskinan tidak hanya *basic needs* semata, tetapi memperhatikan dimensi pelayanan (pendidikan, kesehatan) dan standar kehidupan yang layak. Pengukuran multidimensi memberikan alternatif mengurai permasalahan kemiskinan yang melengkapi pengukuran makro (Prasetya, et.al, 2023).

Problem kemiskinan berdasarkan makro ekonomi dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan upah. Beberapa penelitian menemukan bahwa PDRB dan upah memiliki pengaruh kuat terhadap kemiskinan (Hamdah, et.al, 2023; Rusdarti & Sebayang 2013; Puspita, 2015). Septiadi & Nursan (2020) menjelaskan bahwa indikator makroekonomi yang terdiri dari variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah untuk infrastruktur, inflasi dan nilai tukar rupiah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian Priseptian dan Primandhana (2022) juga menemukan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur.

Salah satu permasalahan di Jawa Tengah adalah ketimpangan distribusi pendapatan per kapita. PDRB per kapita Jawa Tengah 2022 sebesar Rp.42,15 juta/tahun atau Rp.3.512.500,00 /bulan. Jika dibandingkan dengan Garis Kemiskinan (GK) Jawa Tengah 2022 sebesar Rp.438.830,00 berarti PDRB perkapita Jawa Tengah 2022 delapan kali lipat GK, dimana seharusnya tidak ada orang miskin jika pendapatan terdistribusi lebih merata. Ketimpangan yang diukur dengan Indeks Gini di Jawa Tengah meningkat dari 0,366 pada September 2022 menjadi 0,369 di Maret 2023.

Disamping itu, Jawa Tengah menghadapi masalah upah yang relatif rendah. Pada 2022 Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah rata-rata Rp. 2.052.652,00/bulan, sedangkan perkiraan jumlah anggota rumah tangga sebesar 3,73 (3-4 orang), sehingga pendapatan per anggota RT hanya sebesar Rp.550.309,00 perbulan atau hanya 1,25 kali GK.

Pada 2022 rata-rata perbandingan upah minimum dengan GK di Jawa Tengah sebesar 4,68, dan di 2023 menjadi 4,79. Dengan asumsi anggota keluarga sebanyak 4 orang, maka upah minimum tersebut sedikit di atas kebutuhan dasar keluarga. Realitas di lapangan, tidak semua menerapkan kebijakan upah minimum, terutama sektor informal. Di sektor informal, pada 2022 rata-rata upah pekerja sebesar Rp.1.277.319,00 (2,9 kali GK), jika diasumsikan anggota keluarga 4 orang maka upah tersebut hanya 0,73 kali GK perkapita. Di sisi lain, berdasarkan data BPS Jawa Tengah (2023), pengeluaran per kapita per bulan penduduk Jawa Tengah 2022 sebesar Rp.1.121.794,00 atau 2,6 kali GK, artinya terdapat kesenjangan antara rata-rata pengeluaran perkapaita dengan upah riil yang diterima pekerja informal.

Pada sisi perkembangan wilayah, kemiskinan rentan terjadi pada masyarakat dengan keterbatasan akses layanan dasar dan perekonomian (Ginandjar, 1996; Kuncoro, 2003). Kemiskinan di perdesaan lebih banyak disebabkan karena produktivitas pertanian yang rendah, penguasaan lahan yang kecil, upah rendah, akses pasar dan sumber ekonomi lainnya, kurangnya peningkatan kompetensi dan pendidikan, kurangnya layanan kesehatan, inovasi pertanian belum bisa antisipasi kondisi lahan. Kemiskinan di pegunungan karena sulitnya medan dan aksesibilitas, keterbatasan infrastruktur dan layanan, serta keterbatasan akses lapangan kerja dengan upah yang layak. Kemiskinan rentan terjadi di wilayah dengan lahan kering atau kurang subur, serta lahan terbatas. Desa di sekitar hutan juga mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan perekonomian (Bappeda Jateng, 2022).

Beberapa kajian mikro menemukan kemiskinan terjadi pada kelompok tertentu dan rumah tangga dengan akses terbatas pada sumber penghasilan atau sumber ekonomi (Kuncoro, 2003). Kajian LPPM Unsoed (2023) pada sektor pertanian di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Brebes, Kebumen, Purworejo, dan Semarang menunjukkan kepemilikan lahan di bawah $\frac{1}{4}$ hektar, serta sebagian besar belum tersertifikat. Biaya produksi yang relatif mahal dibanding dengan hasil /harga jual, dan sebagian besar berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah per bulan.

Pada kelompok nelayan, kajian Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2022) menemukan kemiskinan terkait keterbatasan akses produksi, kondisi alam, adanya iklim cuaca ekstrem, mereka tidak bisa melaut selama musim tertentu, atau masalah sosial. Kusnadi (2010) menyebutkan bahwa masyarakat nelayan (pesisir) memiliki gaya hidup "konsumtif", demonstratif dalam harta-benda sebagai manifestasi "keberhasilan hidup". Kemiskinan di pesisir juga terjadi karena masalah sosial dan struktur ekonomi terutama peralatan dan pembagian hasil tangkapan, kurangnya inovasi teknologi, mahalnya biaya berlayar, serta akses sarana ekonomi (Bappeda Jateng, 2022).

Pada kelompok lainnya, kemiskinan melekat pada mereka yang bekerja di sektor informal, terutama industri rumah tangga, perdagangan, pengolahan, jasa, sektor

informal lainnya (Bappeda Jateng, 2022). Upah yang mereka terima lebih rendah, bahkan setengah dari UMK yang berlaku.

Penjelasan di atas menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan perhatian lebih kepada upaya peningkatan pendapatan. Pergeseran fokus ke strategi peningkatan pendapatan bukan berarti mengurangi anggaran strategi pengurangan beban pengeluaran karena masih banyak kelompok non produktif seperti lansia atau penderita kesakitan yang masih harus diintervensi.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi pertemuan G7 untuk Asia bagian selatan bahwa penanggulangan kemiskinan fokus pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin (Suryahadi, 2023). Ada 3 strategi utama, *pertama*, pembangunan yang disusun sesuai dengan konteks terdiri dari penargetan presisi melalui sistem informasi geografis (SIG), serta penyusunan program berdasarkan kebutuhan sasaran. *Kedua*, strategi akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan melalui lembaga keuangan mikro, lembaga bisnis atau perusahaan sosial (*Social Enterprise*). *Ketiga*, strategi akses yang lebih luas terhadap pekerjaan melalui pengembangan keterampilan, pelatihan kerja untuk lulusan sekolah sesuai dengan kesempatan kerja yang tersedia dan potensi bisnis.

Di sisi lain, hasil identifikasi TKPKD Provinsi Jawa Tengah menunjukkan alokasi anggaran untuk program pengurangan beban pengeluaran masih jauh lebih besar. Alokasi terbesar pada kelompok pengurangan beban untuk pembayaran PBI BPJS Kesehatan (40,22%), bantuan kepada pekerja dan petani sektor tembakau (8,21%), Kartu Jateng Sejahtera KJS (4,97%), dan rehabilitasi sosial didalam panti dan permakaman (4,69%). Pada kelompok pengurangan kantong kemiskinan anggaran terbesar dialokasikan untuk Rehab Rumah Tidak Layak Huni (24,04%), dan pengelolaan SMK Boarding dan semi boarding (2,97). Adapun pada kelompok peningkatan pendapatan alokasi terbesar untuk Padat Karya Pembangunan RTLH (2,77%) dan kegiatan lainnya anggaran di bawah 0,5%. Alokasi untuk peningkatan pendapatan sebagian besar berupa kegiatan padat karya dan pelatihan.

Beberapa penelitian terdahulu menemukan pentingnya alokasi belanja daerah terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Rusdarti & Sebayang (2013) menyatakan bahwa belanja pemerintah berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Semakin besar nilai Belanja Daerah, semakin kecil tingkat kemiskinan (Nany, et al, 2022). Alokasi belanja yang tepat akan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan (Nugraha, 2021).

Oleh sebab itu, dalam tataran implementasi baik bentuk program maupun lokusnya perlu diperhatikan apakah sudah tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan optimal untuk masyarakat miskin. Untuk itu diperlukan analisis dan pemetaan yang lebih akurat terhadap lokus dan fokus penanggulangan kemiskinan. Di tengah keterbatasan pengukuran makro untuk memotret aspek non moneter dan kendala validitas data kemiskinan, pendekatan multidimensi dapat membantu menjembatani kesenjangan tersebut. Pendekatan multidimensi melengkapi pengukuran kemiskinan makro dengan memberikan informasi yang lebih komprehensif dan memberikan tawaran alternatif untuk formulasi kebijakan kemiskinan (Prasetya, et.al, 2023).

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, beberapa rekomendasi teknis yang dapat dijalankan dengan segera di Jawa Tengah antara lain :

1. Kebijakan penanggulangan kemiskinan berupa desain, strategi dan rencana aksi sebagai suatu rancangan utuh yang terintegrasi antar sektor, antar level makro-mikro dan kewilayahan, serta memperhatikan sinkronisasi dengan program pemerintah pusat dan kabupaten/kota dengan melibatkan multiaktor non pemerintah, serta tidak *government-centered*.
2. Rencana aksi program dan kegiatan tidak hanya memuat agenda pada dimensi pemenuhan layanan dan kebutuhan dasar, namun memperhatikan dimensi ekonomi makro seperti pemerataan pendapatan, penerapan kebijakan pengupahan pada sektor formal dan nonformal, serta menggunakan pendekatan berbasiskan wilayah dan memperkuat kolaborasi antar *stakeholders*.
3. Melakukan pemetaan yang lebih akurat melalui kombinasi pendekatan makro dan mikro, memanfaatkan pendekatan multidimensi untuk menjembatani pengukuran makro dan pendataan mikro (*by name by address*). Data Terpadu Jawa Tengah (DT Jateng) dapat dikembangkan menjadi sistem pemetaan spasial dan database yang akurat dalam suatu sistem informasi geografis (SIG).
4. Mensinergikan dan menyesuaikan komposisi anggaran penanggulangan kemiskinan untuk pengurangan beban, pengurangan kantong kemiskinan, dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Peningkatan pendapatan fokus pada upaya membuka kesempatan kerja lebih luas dengan upah yang kompetitif, menumbuhkan wirausaha baru dari hulu sampai hilir.
5. Perangkat Daerah merumuskan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan desain, strategi dan rencana aksi yang sudah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Referensi

- Amalia, Lutfi & Palupi Lindiasari Samputra. (2020). Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat. Sosio Konsepsia Vol. 9, No. 02, Januari – April; 113 – 131
- Bappeda Povinsi Jawa Tengah. 2022. Pemetaan Akar Permasalahan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah
- Bappeda Povinsi Jawa Tengah. 2019. Penyusunan Desain Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah
- BPS Jawa Tengah. 2023. Jawa Tengah Dalam Angka 2022.
- Budiantoro, Setyo, Victoria Fanggidae, Wiko Saputra, Ah Maftuchan, Dwi Ratna Puspa Artha. (2013). Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia. Prakarsa Economic Policy Working Paper. Perkumpulan Prakarsa.
- Dwiarto, Raden. Inovasi Penyaluran Jaminan Sosial Tepat Sasaran Melalui Kebijakan Pengelolaan Anggaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Pemanfaatan Aplikasi "Cek Bansos". Prosiding Seminar Nasional UNIMUS. Vol. 6. 18 Oktober 2023
- Ghatama, Moch. Aldino Putra. 2018. Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018
- Hamdah, Lutfiah Nurul, Sri Subanti, Etik Zuhkronah. 2023. Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Regresi Data Panel. Lomba Dan Seminar Matematika XXXI. Prosiding Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika Volume 8 (2023) e-ISSN No. 2721-6802
- Hermawati, Istiana. (2017). Pengukuran Konstrak Kemiskinan Di Indonesia. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 41, No. 3, Desember 2017, 269-284
- Hermawati, Istiana & Endro Winarno. (2020). Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Sosio Konsepsia. Vol. 9, No. 03, Mei – Agustus, Tahun 2020; 257 – 270
- Kameo, Daniel D. 2023. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Materi disampaikan dalam FGD Analisis Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah. Badan Riset dan Inovasi Daerah. Semarang, 26 September 2023
- Kuncoro, M. (2003). Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan. UPP AMP YKPN: Yogyakarta, hlm. 5.
- Kusnadi. 2010. Kebudayaan Masyarakat Nelayan. Makalah disampaikan dalam kegiatan JELAJAH BUDAYA TAHUN 2010. dengan tema "Ekspresi Budaya Masyarakat Nelayan di Pantai Utara Jawa". yang diselenggarakan oleh Balai Pelestari Sejarah dan Nilai Tradisional. Kementeian Kebudayaan dan Pariwisata. di Yogyakarta. tanggal 12-15 Juli 2010
- LPPM UNSOED. 2023. Survey Indeks Kerentanan Sosial Ekonomi Kelompok Petani Dan Pendatang di Jawa Tengah
- Nany, Magdalena, Daniel Budi Pratama, Murni Prasetyaningrum, Astri Utami Kusumaningsih. 2022. Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. JEKU (Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan) Volume 22, No. 3, September 2022.
- Nugraha, Desan Adhi. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Belanja daerah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Periode 2015-2019 (Studi Kasus 29 kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah Priode 2015-2019). Skripsi Progam Studi Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta. 2021
- Prasetya, Darmawan, Rizky Deco Praha, Aqilatul Layyinah, Irvan Tengku Harja, Eka Afrina Djamhari, Muto Sagala, Andhika Nurwin Maulana. 2023. Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2012-2021. Perkumpulan PRAKARSA
- Priseptian, Laga & Wiwin Priana Primandhana. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan. Forum Ekonom. 24 (1) 2022; 45-53. ISSN Print: 1411-1713 ISSN Online: 2528-150X
- Puspita, Dita Wahyu. 2015. Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. JEJAK Journal of Economics and Policy 8 (1) (2015): 100-107
- Rusdarti, Lesta Karolina Sebayang. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa
- Suryahadi, Asep. 2023. Merumuskan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bukti SMERU. Materi disampaikan dalam FGD Analisis Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah. Badan Riset dan Inovasi Daerah. Semarang, 26 September 2023
- Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). Pengentasan kemiskinan indonesia: analisis indikator makroekonomi dan kebijakan pertanian. Jurnal Hexagro. <https://doi.org/10.36423/hexagro.v4i1.371>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di indonesia. JABE (Journal of Applied Business and Economic). <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>
- Zuhdiyati, Noor & David Kaluge. (2017). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus pada 33 Provinsi). JIBEKA, Vol. 11 Nomor 2 Februari 2017;27– 31
- Zuhri, Mursid & Arif Sofianto. (2020). Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah, Indonesia. Jurnal PKS Volume 19 Nomor 3 Desember 2020; 277-294

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penanggung Jawab : Mohamad Arief Irwanto

Redaktur : Edi Wahyono

Penulis : Senen Budi Prasetyo

Arif Sofianto

Lita Febrian

Okki Chandra Ambarwati

Editor : Alfian Prigi Utomo

Telepon
(024) 3540025

Email
brida@jatengprov.go.id

Laman
www.brida.jatengprov.go.id

Alamat
Jalan Imam Bonjol 190 Semarang